

**PENINGKATAN KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT
DI ERA KEPEMIMPINAN OBAMA DALAM KONFLIK SURIAH
(2011-2016)**

*(The Increasing Involvement by United States of America under Obama's
Administration in Syrian Conflict 2011-2016)*

Oleh : Budi Wirasatya Adi

Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2018

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tentang meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 yang dimana konflik tersebut bermula dari tuntutan rakyat yang ingin rezim Bashar al-Assad untuk digantikan karena dianggap tidak adil dan otoriter, akibatnya munculah pihak oposisi / pemberontak yang berusaha menjatuhkan rezim Assad dan mengakibatkan peperangan yang panjang. Amerika Serikat melibatkan dirinya dalam konflik tersebut dikarenakan sejarah keterlibatannya yang panjang di dalam berbagai konflik kawasan Timur Tengah secara umum. sejak Perang Dingin hingga saat ini dimana Suriah menjadi tujuan intervensi Amerika dengan membuat beberapa kebijakan luar negeri berupa bantuan dana keuangan, bantuan kemanusiaan dan militer untuk membantu pihak oposisi agar tetap bisa melakukan perlawanan terhadap rezim Assad, hal itu dilakukan Amerika dikarenakan ia menganggap dirinya sebagai *Guardian of Democracy* dan *Champion of Democracy* sehingga ia melibatkan dirinya dalam konflik Suriah tersebut untuk menjamin transisi ke sistem negara yang lebih demokratis, Amerika juga menggunakan berbagai macam cara untuk dapat menyelesaikan konflik ini dengan melalui jalur baik diplomasi maupun militer, tetapi hal tersebut dianggap hanya memperkeruh konflik tersebut dan belum berhasil dalam mewujudkan hadirnya perdamaian.

Kata kunci: Keterlibatan Amerika Serikat di Suriah, Konflik Suriah, Kebijakan Luar Negeri Amerika

ABSTRACT

This study was created with the aim to know about the increasing involvement of the United States in a conflict that occurred in Syria from 2011 to 2016 where the conflict stems from the demands of the people who want the regime of Bashar al-Assad to be replaced because it is considered unfair and authoritarian, it appears that the opposition / rebels are trying to overthrow the Assad regime and resulting a long warfare. The United States involved itself in the conflict because of its long history of involvement in the various conflicts of the Middle East in general. since the Cold War to date where Syria became the destination of American intervention by making some foreign policy in the form of financial aid, humanitarian and military assistance to assist the opposition in order to remain resistant to Assad's regime, it is being done by America because he considers himself as a Guardian of Democracy and Champion of Democracy so that he involves himself in the Syrian conflict to guarantee the transition to a state system that more democratic, America also uses a variety of ways to resolve this conflict through diplomatic and military channels, but it is considered only to conflate the conflict and has not succeeded in realizing the presence of peace.

Keywords: US Involvement in Syria, Syrian Conflict, American Foreign Policy

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan Liberal-kapitalis mempunyai pengaruh yang luas, begitu pula pada saat era Perang Dingin yang tejadipasca berakhirnya Perang Dunia II, Amerika dan Uni Soviet dengan ideologi komunis saling memperebutkan dominasi dalam dunia internasional, hingga Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur berakhir pada tahun 1990 dengan kemenangan Blok Barat setelah usainya Perang Dingin dimulailah babak baru bagi Amerika Serikat dalam memperluas pengaruh dan kepentingannya. Bagaimana yang dimengerti secara umum, istilah “kepentingan nasional” memiliki arti lain yaitu egois dan tidak berprinsip, istilah tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa keuntungan geopolitik dan ekonomi sebuah Negara tanpa menghiraukan tentang moralitas, hukum, atau kesejahteraan yang lain, kecuali hanya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan sebuah Negara.¹

Pada era Presiden Obama Amerika Serikat memiliki pengaruh signifikan dalam konstelasi politik dunia termasuk Timur Tengah, dengan status tersebut Amerika memiliki banyak kepentingan yang harus dipenuhi seperti kepentingan ekonomi, militer, dan penyebaran ideologi demokrasi melalui kebijakan luar negerinya, kebijakan luar negeri A.S dibuat untuk menjaga eksistensinya di suatu wilayah, baik itu kepentingannya

¹Seth P. Tillman, *The United States In The Middle East: Interests and Obstacles*. Bloomington: Indiana University Press, 1982. (hlm.43)

sendiri, kepentingan sekutunya dan para penguasa sekutu A.S di Timur Tengah serta untuk menjamin kemudahan eksplorasi dan transportasi minyak ke seluruh penjuru dunia.²

Dalam kebijakan luar negeri nya Presiden Obama memiliki pendekatan yang sama dengan Era Presiden Nixon dalam mengambil kebijakan luar negeri terutama dikawasan Timur Tengah yang dimana kedua Presiden menggunakan kebijakan *Detente*, kebijakan ini digunakan untuk mengurangi eskalasi adventurisme pasukan Amerika di Timur Tengah., Amerika hadir di Timur Tengah dengan motivasi untuk menyebarkan ideologi nya yaitu demokrasi, Amerika menganggap diri nya sebagai “*the champion of democracy*” dan “*the guardian of democracy*” hal inilah kemudian yang menjadi motivasi A.S untuk melakukan intervensi di dalam berbagai konflik di Timur Tengah

Amerika menginginkan agar posisinya menjadi satu-satunya kekuatan yang mendominasi di wilayah Timur Tengah, hal tersebut didasarkan oleh fakta bahwa kawasan Timur Tengah memiliki nilai strategis dalam politik dunia, nilai-nilai strategis tersebut membuat kawasan Timur Tengah menjadi tempat perebutan pengaruh dan kepentingan bagi negara-negara besar.

Motivasi yang kuat lainnya datang pasca Peristiwa 9/11 di era presiden Bush pada tahun 2001 yang menasar WTC. A.S berusaha untuk mencegah munculnya kekuatan politik berhaluan Islam dan berusaha menjatuhkan pemimpin negara Islam yang masih menganut sistem tradisional yang mengikat, seperti pemerintahan Monarkhi Absolute, contohnya yaitu gelombang Arab Spring yang melanda negara-negara di Timur Tengah pada tahun 2011.

Salah satu negara yang terpengaruh gelombang Arab Spring yaitu Suriah, rakyat menuntut Bashar al-Assad turun dari kursi kepemimpinan karena dianggap tidak demokratis dan adil terhadap rakyatnya sehingga rakyat Suriah menuntut pengembalian hak-hak sipil. Rezim Bashar al-Assad mengklaim dirinya sebagai pemimpin sah yang dimana ia mendapatkan legitimasi secara penuh dari rakyatnya sehingga segala macam usaha untuk meng-kudeta rezimnya dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Meskipun dengan kebijakan *Detente*, Presiden Obama dalam Krisis Suriah mempunyai strategi yang lain karena dalam Krisis Suriah diawali dengan peristiwa Arab Spring yang mengejutkan tidak hanya Amerika tetapi seluruh Dunia yang dimana negara-negara Arab dengan sistem Monarki Absolute di jatuhkan oleh rakyatnya yang mendukung pemerintahan yang lebih demokratis, tentu kejadian ini tidak disia-siakan oleh Amerika dengan mengirim pasukannya ke negara-negara Arab yang berkecamuk salah satunya Suriah.

Negara-negara lain mulai menunjukkan keinginannya untuk melibatkan dirinya ke dalam konflik di Suriah ini, yang dimana dua negara besar terlibat di dalamnya yaitu; Russia melalui menteri luar negerinya Sergej Lavrov, mendukung rezim yang saat ini masih di pegang oleh Bashar al-Assad dan Amerika Serikat bersama Saudi yang menentang otoritas Bashar al-Assad saat ini.

²Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa Publishing House, 2014. (hlm.136-137)

Amerika menjadi salah satu pihak yang mendukung upaya demokratisasi di Suriah dengan mendukung pihak oposisi bersama Arab Saudi, hal ini dibuktikan dengan pengumuman bahwa Amerika akan mengirimkan bantuan senjata kepada kelompok pemberontak/oposisi setelah Amerika Serikat meyakini dan memiliki bukti bahwa Presiden Assad menggunakan senjata kimia untuk melawan kelompok oposisi³. Selain mempersenjatai kelompok oposisi, Presiden Obama juga merencanakan *limited military strike* terhadap Suriah sebagai bentuk hukuman atas penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya yang mengakibatkan rakyat Suriah itu sendiri yang menjadi korban.

Amerika serta negara-negara sekutu seperti Inggris, Perancis, Arab Saudi dan Turki mendukung agar pihak Oposisi dari Rezim Assad seperti FSA (Free Syrian Army) dan NFC serta bantuan dana sebesar \$60 juta pada tahun 2013 untuk terus melakukan perlawanan agar terwujudnya pemerintahan yang demokratis, sedangkan di sisi lain Russia dan Iran mendukung Rezim Bashar al-Assad untuk terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin Suriah, Russia memiliki markas militer di wilayah Suriah tepatnya di Tartus sehingga dengan mudah memobilisasi militer nya jika Amerika dan sekutu melancarkan serangan terhadap Suriah.

Amerika mengumumkan bahwa Amerika memberikan tambahan bantuan humaniter kepada Syria sebesar USD 364 Juta, jika di total sejak tahun 2011 hingga september 2016 maka bantuan dana sebesar \$6 miliar telah dikucurkan untuk penanganan darurat di Suriah termasuk untuk menyediakan cadangan makanan, obat-obatan, air minum bersih dan suplai lainnya untuk membantu masyarakat Suriah yang terdampak oleh perang. Amerika juga menerima pengungsi Suriah sebanyak 10.000 orang per tahunnya tetapi jumlah tersebut terus meingkat dari 2011 hingga 2016 sebanyak 12.500 pengungsi.⁴

Upaya lain yang dilakukan Amerika adalah dengan mengadakan Konferensi Jenewa II pada 30 Juni 2012 atas prakarsa Amerika dan Rusia yang dimediasi oleh PBB, dimana dalam pertemuan tersebut kedua pihak yang bersengketa diharapkan dapat duduk bersama membentuk sebuah pemerintah transisi dengan wewenang eksekutif penuh, namun nampaknya Konferensi Jenewa ini belum dapat memberikan dampak yang berarti akibat adanya perbedaan kepentingan-kepentingan pihak terkait dalam konflik ini.⁵ Langkah Amerika melalui jalur diplomatis berupa pengajuan Resolusi DK PBB terkait penggunaan senjata kimia yang menurut OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon) bahwa penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh militer Suriah dikategorikan sebagai temuan yang dapat dibuktikan dan telah melanggar Resolusi PBB 2118 tahun 2013.

Usaha Amerika tidak mudah dikarenakan kurangnya dukungan oleh sekutu-sekutu yang tidak seperti dulu dimana mereka mendukung agresi militer Amerika Serikat di Afghanistan, adanya kehadiran Russia yang kuat berada dibalik rezim Bashar al-Assad sehingga konflik Suriah menjadi konflik yang berkepanjangan tanpa adanya titik terang resolusi damai, pada Oktober 2011 dan Juli 2012 Amerika yang mendukung draf resolusi

³Associated Press, 'UN chief opposes US arms to Syria rebels, says on site probe must confirm chemical weapon use'<http://www.foxnews.com/world/2013/06/14/un-chief-opposes-us-arms-to-syria-rebels-says-on-site-probe-must-confirm/>, diakses pada 6 Desember 2017

yang berisi kecaman terhadap Rezim Assad mengalami kegagalan dikarenakan Rusia dan China mem-veto resolusi tersebut, hal ini tentu menghancurkan harapan akan meredanya konflik di Suriah.

Beragam pendapat yang dikemukakan terkait masalah yang menjadi sumber konflik di Suriah. *Pertama*, masalah sosial, ekonomi dan politik dalam negeri yang dialami oleh Suriah seperti tingginya jumlah pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya kesempatan mobilitas sosial, pembatasan hak politik serta aparat keamanan yang represif. *Kedua*, tuntutan penduduk Suriah agar dilakukan reformasi dan penggantian rezim keluarga Assad yang berkuasa sejak tahun 1970 sampai saat ini.

Rumusan Masalah

Mengapa Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya dalam Konflik Suriah pada era Obama tahun 2011-2016?

Kerangka Teoritis

Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri (William D. Coplin).

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan tentang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Amerika, penulis akan menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul "*Introduction of International Politic*". Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan "*policy influencer*".

Kemampuan Ekonomi dan Militer

Analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam mempengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari perilaku raja-raja Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja. Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variabel ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa.

Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik

suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya. Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif.

Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara manayang kawan dan yang lawan. Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomi dan politis.

Hipotesa

Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya dalam Konflik Suriah berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi dalam negeri Amerika Serikat, *Policy Influencer* dimana Presiden Obama berusaha meyakinkan Kongres untuk melancarkan kepentingan Amerika di Timur Tengah dengan membantu Suriah.
2. Ekonomi dan Militer yang dimana Amerika menjadi negara dengan kekuatan Ekonomi dan Militer terbesar di Dunia.
3. Konteks Internasional, Amerika Serikat merupakan Negara yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkup internasional baik dalam hal politik, ekonomi maupun militer.

DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH :

Pada bab ini penulis akan membahas tentang dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada saat Perang Dingin, pasca Perang Dingin dan dibandingkan dengan era presiden Barack Obama yang dimana Amerika menjadi salah satu pihak yang mendukung upaya demokratisasi di Suriah dengan mendukung pihak oposisi bersama Arab Saudi.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada Era Perang Dingin (1945-1990)

Amerika Serikat yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan Liberal-kapitalis mempunyai pengaruh yang luas, begitu pula pada saat era **Perang Dingin** yang terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, Dalam perjalanannya Pada era Perang Dingin Amerika Serikat memfokuskan kebijakannya dalam rangka memenangkan Perang Dingin melalui cara pemberian pinjaman-pinjaman lunak terhadap negara-negara di benua Eropa (barat) dan Asia, tetapi tidak dengan Timur Tengah. Presiden Truman dengan Doktrinnya yaitu Doktrin Truman yang di deklarasikan pada tahun 1947 menyatakan bahwa Amerika akan melakukan

apapun yang diperlukan untuk menghentikan penyebaran pengaruh Komunisme di seluruh penjuru dunia termasuk di kawasan Timur Tengah.

Truman pada 12 Maret 1947 kepada Kongres meminta bantuan dana untuk membantu Yunani dan Turki dengan pinjaman sebesar 400 juta dollar untuk mencegah pengaruh Komunisme Soviet di kedua negara tersebut, di Timur Tengah sendiri Amerika dibawah pemerintahan Truman menjadi negara pertama yang mengakui berdirinya negara Yahudi yaitu Israel secara *de facto*, bagi Truman ini merupakan kepentingan Amerika yang tidak hanya mengutamakan keselamatan Israel tetapi juga kepentingan akan minyak dan keunggula Amerika itu sendiri.(Lenczowski, 1990, hal. 9) Hal ini berimbas kepada timbulnya sentimen anti-Amerika di antara negara-negara Arab karena pendudukan wilayah Palestina yang dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Amerika, Truman juga mendukung adanya penempatan 100.000 orang yahudi di Palestina.(Pratt, 1965, hal. 514)

Alasan dibelakang sikap Amerika yang mendukung Israel bukan tanpa tujuan tetapi dikarenakan adanya kepentingan Amerika yang pada saat itu dibawah pemerintahan Truman sedang menghambat penyebaran ideologi Komunisme yang di sebarakan oleh mantan sekutunya dalam Perang Dunia ke dua, dan juga Amerika membutuhkan sekutu yang dapat dijadikan akses menuju wilayah Timur Tengah yang memiliki sumber daya alam berupa cadangan minyak yang dibutuhkan Amerika untuk menjalankan ekonomi negara nya.

Pada 5 Januari 1957, Presiden A.S Dwight Eisen Hower dengan diawali pidatonya mengadakan pertemuan dengan kongres untuk merubah haluan yang dimana ia menganggap Timur Tengah sebagai wilayah yang seharusnya diperhatikan karena letaknya yang strategis dan akibat adanya nasionalisasi terusan Suez oleh presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang diikuti oleh Suriah dengan memotong jalur pipa nya sehingga membuat Inggris bergantung kepada Amerika untuk menggantikan kerugiannya di Timur Tengah

Presiden Johnson dikenal dekat dengan Kelompok lobi Yahudi di Amerika sejak masih menjadi anggota Kongres pada tahun 1950an, dengan kedekatannya tersebut ia menginstruksikan pengiriman pesawat skyhawk sebanyak 50 unit, 250 unit tank dan peralatan miiter canggih lainnya hal ini menjadi penyebab kuat atas kemenangan Israel di dalam peperangan melawan Arab pada tahun 1967.

Presiden Nixon melakukan strategi *retrenchment*, yaitu suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi skala keterlibatan Amerika Serikat dalam masalah luar negeri. Meski demikian Nixon tetap memiliki strategi yang jangkauannya lebih luas dan efektif atau yang biasa disebut *grand strategy* berupa “strategi pilar ganda”, secara implisit strategi ini menunjukkan indikasi strategi *offshore balancing* yang kemudian dalam perjalanannya Iran dan Arab Saudi berperan sebagai penyeimbang dikawasan Timur Tengah.(Miglietta, 2002, hal. 229)

Presiden Ford mendukung dan meneruskan kebijakan *Detente* yang diambil oleh Presiden Nixon hal ini dapat dilihat dari langkah Presiden Ford yang mempertahankan Henry Kissinger yang dulu bekerja untuk Nixon (Greene, 2014). Pada musim semi tahun 1975, Presiden Ford melakukan rangkaian kunjungan di Timur Tengah termasuk Presiden Mesir Anwar Sadat, Perdana Menteri Israel Rabin, Raja Hussein dari Yordania, Deputy Perdana Menteri Suriah Khaddam dan yang lain nya untuk membahas prospek perdamaian yang adil dan komprehensif di wilayah Timur Tengah, tidak lama kemudian pada awal bulan September sebuah kesepakatan yang berpotensi memiliki peran penting di wilayah Timur Tengah terwujud antara Mesir dan Israel, kesepakatan ini memperkuat gencatan senjata tahun 1973, akibat dari kesepakatan tersebut Kanal Suez terbuka bagi kapal barang Israel untuk pengiriman non-militer yang merupakan peristiwa pertama kali nya dalam bertahun-tahun.

Pada Tahun 1980 munculah Doktrin Carter yang dimana Presiden Carter membuat pernyataan persatuan yang menggaris bawahi pendekatan yang digunakan dalam kerangka kerjasama keamanan negara-negara Timur Tengah melawan Uni Soviet, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Amerika di wilayah tersebut terutama dikarenakan Amerika sangat bergantung pada suplai minyak dari TimurTengah.(Kenneth A. Oye, 1983, hal. 370-372)

Pada tahun 1981, saat Amerika Serikat dipimpin oleh Ronald Reagan Amerika memiliki kepentingan yang konsisten di Timur Tengah bahkan Timur Tengah dijadikan fokus utama dan mungkin satu-satu nya fokus dari kebijakan luar negeri Amerika dalam beberapa tahun belakangan, tidak hanya karena wilayah tersebut secara meningkat menjadi tempat terjadinya krisis internasional tetapi juga memiliki peran penting dalam mengatur secara keseluruhan dinamika politik luar negeri Amerika.(Kenneth A. Oye, 1983, hal. 368)

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Pasca Perang Dingin (1990-2006) :

Dengan hilangnya pengaruh Ideologi Komunisme, yang mana pada saat bersamaan Uni Soviet pun runtuh Amerika menggunakan kesempatan ini untuk mencegah jika saja muncul kembali kekuatan baru yang dapat membahayakan posisi Amerika di Timur Tengah dan bahkan di seluruh penjuru dunia dengan sebuah rancangan tatanan dunia yang baru atau yang biasa disebut New World Order.

Hal tersebut bertujuan untuk mengukuhkan bahwasan nya Amerika adalah negara yang menguasai dunia, dalam upaya tersebut Amerika meninjau ulang strategi-strategi nya dalam rangka mempertahankan posisi nya sebagai negara adidaya dan sebagai negara paling berpengaruh di muka bumi, strategi tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang ber-nama National Security Strategy atau yang disingkat NSS.

Pada 1990 sebuah kesempatan bagi Amerika Serikat untuk menunjukkan pada dunia bahwasannya Amerika merupakan pelindung dan pemimpin dunia ikut mengintervensi serangan Irak ke Kuwait atau yang disebut Perang Teluk I dimana Amerika mengirimkan pasukannya dalam operasi militer yang dinamai *Operation Dessert Storm*, dengan Irak menempatkan 300.000 pasukannya di Kuwait berhasil menguasai wilayah Kuwait dengan mudah dan menguasai suplai Minyak dunia sebesar 20% pada saat itu.

Melalui invasi ke Irak inilah Amerika berhasil memasuki wilayah Timur Tengah dengan mudah, Amerika berhasil mendirikan Pangkalan Militernya di wilayah Timur Tengah dan memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut, melalui basis militer inilah Amerika Serikat berhasil menaklukkan Irak yang dianggap sebagai ancaman bagi Amerika, kepentingannya dan sekutunya di Timur Tengah.

Amerika juga menggunakan Politik Luar Negeri Standar Ganda, hal ini bertujuan untuk melancarkan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah yang mana untuk mencapai tujuannya Amerika tidak memaksakan sistem Demokrasi terhadap Saudi dikarenakan pengaruh Saudi yang besar di kawasan Timur Tengah sehingga dapat dijadikan sekutu yang berguna bagi Amerika agar kepentingannya berjalan lancar di wilayah tersebut.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Era Presiden Barack Obama (2009-2016):

Presiden Obama memiliki pendekatan yang sama dengan Era Presiden Nixon hal ini menjadi menarik dikarenakan dengan perbedaan jarak waktu selama empat puluh tahun ternyata terdapat kesamaan diantara keduanya dalam mengambil kebijakan luar negeri terutama di kawasan Timur Tengah yang dimana kedua Presiden menggunakan kebijakan *Detente*, pada era Presiden Nixon kebijakan ini digunakan untuk mengurangi eskalasi adventurisme pasukan Amerika di Timur Tengah terutama pasca era kepemimpinan Presiden Lyndon tahun 1964-1969 (Jones, 2008, hal. 354-380). Obama dalam menjalankan kebijakan luar negerinya cenderung lebih lunak, Presiden Obama lebih menekankan konsep *Smart Power* ketimbang *Hard Power* yang digunakan Bush. Konsep *Smart Power* ini merupakan perpaduan antara *Hard Power* dan *Soft Power*, istilah *Smart Power* ini merujuk dari "*Foreign Affairs*" pada tahun 2004 (Nossel, 2004).

Konsep *Smart Power* pada saat ini di populerkan oleh Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton dan Presiden Obama yang berusaha merubah citra Amerika yang agresif di wilayah Timur Tengah saat di pimpin Presiden Bush dalam kebijakan *War On Terror* nya menjadi lebih efektif. Seperti yang dikatakan Menlu Hillary Clinton "*With Smart Power, diplomacy will be the vanguard of foreign policy*"

Dengan jelas Amerika Serikat menyikapi dengan serius Krisis yang terjadi di Suriah, hal ini ditunjukkan dengan pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh Amerika seperti halnya bantuan senjata dan bantuan lainnya berupa *Non-Lethal Aid* kepada pihak oposisi agar dapat terus melakukan perlawanan terhadap Rezim Assad, Lalu sikap Amerika terhadap Suriah tidak terlepas dari hubungan antara Amerika dengan Suriah itu sendiri, dimana dibawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad yang pada saat itu memburuk dikarenakan invasi yang dilakukan oleh Amerika terhadap Afghanistan dan Iraq dalam kebijakan *War on Terror* Era Presiden Bush, Suriah ikut membantu Iraq dalam melawan Amerika. Selain itu Suriah juga masuk kedalam daftar *Axis of Evil* yang mana dipercayai telah mendukung terorisme di Amerika sejak 1979 yang diterbitkan oleh NSC (National Security Council) directive-17 pada Desember 2002.(State, U.S Relations With Syria, 2014)

Amerika menjadi salah satu pihak yang mendukung upaya demokratisasi di Suriah dengan mendukung pihak oposisi bersama Arab Saudi, hal ini dibuktikan dengan pengumuman bahwa Amerika akan mengirimkan bantuan senjata kepada kelompok pemberontak/oposisi setelah Amerika Serikat meyakini dan memiliki bukti bahwa Presiden Assad menggunakan senjata kimia untuk melawan kelompok oposisi. Selain mempersenjatai kelompok oposisi, Presiden Obama juga merencanakan *limited military strike* terhadap Suriah sebagai bentuk hukuman atas penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya yang mengakibatkan rakyat Suriah itu sendiri yang menjadi korban.

Amerika dengan alasan kemanusiaan menyatakan akan berusaha membantu untuk mengakhiri konflik Suriah dengan melalui jalur militer namun hal tersebut masih merupakan sebuah isu yang dimana Presiden Barack Obama mendapatkan desakan dari Kongres untuk mengerahkan kekuatannya untuk membantu pihak oposisi pemerintah Suriah yang sedang berusaha untuk menjatuhkan Bashar al-Assad sehingga banyak korban berjatuhan dikarenakan pemerintah Assad menggunakan senjata-senjata yang berbahaya terhadap rakyatnya sendiri.

Amerika mendapatkan dukungan dari negara-negara yang sepaham dan sependapat tetapi usaha ini gagal dikarenakan pada Oktober 2011 dan Juli 2012 Amerika yang mendukung draf resolusi yang berisi kecaman terhadap pemerintahan tetapi gagal karena Russia dan China mem-veto resolusi tersebut, hal ini tentu menghancurkan harapan akan meredanya konflik di Suriah itu sendiri. Sejak meletusnya konflik di Suriah pada bulan Maret 2011 sampai dengan Agustus 2016 jumlah korban meninggal sebanyak 301.781 jiwa, korban dari warga sipil terdiri dari 15.099 anak-anak dan 10.018 wanita, sementara yang mengungsi sebanyak 2,4 juta jiwa dan 1/4 diantara pengungsi tersebut adalah anak-anak dan perempuan, sekitar 4 juta warga Suriah kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah.

KONFLIK SURIAH PASCA ARAB SPRING :

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Konflik Suriah Pasca terjadinya peristiwa Arab Spring yang dimana akan dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu diawali dengan menceritakan sejarah awal mula Konflik di Suriah dan dilanjutkan dengan penjabaran mengenai penyebab terjadinya Konflik di Suriah yang sedang berlangsung.

Sejarah Awal Mula Konflik Suriah

Mesirdan Suriahpada 22 Februari 1958bersatumembentukRepublikPersatuanArab(State, 2014), namunpersatuaninitidak berlangsung lama danmemicuterjadinyakudetamiliterpada 28 September 1961, hinggaSuriah padaakhirnyakeluardan menamai diri nya sebagai Republik Arab Suriah (*Syrian Arab Republic*). Lalu kabinetbaru pun dibentuk di bawahbayang-bayangPartai Ba'ath yang dipimpin oleh Michel Aflaq dan Salah al-Din al-Bitar yang membuat kabinet pada saat itu di dominasi oleh anggota partai Ba'ath.

Lalu terjadi lagi kudetayang dilakukan oleh pihak militerpada 13 November 1970 yangdimanaMenteriPertahananSuriah pada saatitu yang di pegang oleh Hafiz al-Assad secara sepihak menobatkandirinyasebagai Presiden. Setelah 30 tahunberkuasapenuh atasSuriah,pada 10 Juni tahun 2000 Hafiz al-Assad pun dinyatakan meninggal dunia. Bashar al-Assad secararesmidilantikpada 17 Juli 2000 untukmasajabatan 7 tahun dan terus berkuasa hingga saat ini, hal ini lah yang menyebabkan masalah yang timbul setelah negara-negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Yordania, Oman termasuk Suriah yang dimana rakyat turun kejalan untuk menyuarakan agar diganti nya tampuk kekuasaan dari sistem Monarkhi Absolute menjadi lebih Demokratis dan rakyat menuntut agar presiden Assad untuk turun dari kursi kepemimpinan nya dikarenakan kebijakan nya yang represif dan tidak pro terhadap rakyat yang mana rayat Suriah merasa sulit untuk melakukan mobilitas sosial bahkan Presiden Bashar al-Assad pun menggunakan Undang-Undang Darurat tahun 1963 untuk membungkam hak berpendapat dan berbicara rakyat nya sehingga membuat masyarakat merasa tidak puas terhadap pemerintahan Assad.

Rezim Assad membangun negara nya dengan menempatkan tentara nya baik sebagai simbol kekuasaan maupun sebagai alat untuk mengontrol kestabilan dalam negeri, di dalam beberapa kesempatan tentara digunakan untuk menekan rakyat nya sendiri dalam rangka untuk mempertahankan stabilitas politik. Rezim Assad dibangun dengan ditopang empat pilar yaitu; *pertama*, mempertahankan kekuasaan ditangan keluarga al-Assad, *kedua* rezim ini membantu mempersatukan kaum minoritas Alawi, *ketiga*, mengontrol seluruh aparaturn militer intelijen dan *keempat* yaitu monopoli partai Ba'ath atas sistem politik.

Terdapat faktor lain yang dapat dianggap sebagai pelindung bagi Suriah dari terpaan gelombang Arab Spring, yaitu berupa sikap pemimpin nya yang anti-Barat dan mendukung Palestina, kedua hal tersebut dianggap dapat menguntungkan rezim Assad dan akhir nya dapat memenangkan kepercayaan / keyakinan masyarakat terhadap rezim tersebut.

Tetapi hal tersebut tidak lama bertahan hingga pada akhir nya terjadi penyiksaan terhadap anak-anak sekolah yang dilakukan oleh aparat keamanan di sebuah kota kecil Suriah yang terletak 100 kilometer dari Damaskus dan berbatasan dengan Yordania yaitu kota Deera. Kejadian tersebut merubah stabilitas negara Suriah secara cepat, pada 6 Maret 2011 muncul perlawanan di kota Deera yang dilakukan oleh orangtua dari anak-anak yang di tahan oleh pihak berwenang setempat karena telah membuat tulisan di dinding berupa grafiti yang bertuliskan *As-Shaab Yoreed Eskaat el Nizam* yang diartikan “Rakyat Ingin Menumbangkan Rezim”.(Kuncahyono, 2013, hal. 114)

Tanggal 15 Maret 2011 terdapat demonstrasi juga yang terletak di daerah kota pantai Baniyas, pemicu dari ada nya demonstrasi tersebut dikarenakan pelarangan yang dilakukan oleh Rezim yang berkuasa di kota tersebut kepada para wanita yang bekerja sebagai guru untuk menggunakan jilbab khas Suriah atau Niqab, protes yang dilakukan oleh para demonstran disambut dengan kekerasan seperti pemukulan dan pembubaran secara paksa menggunakan tembakan gas air mata dan water cannon ke arah demonstran hingga melukai mereka..

Dengan ada nya aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang represif tersebut terhadap demonstran, membuat marah rakyat Suriah di kawasan lain yang akhir nya merambat ke kota-kota seperti Hama, Dayar al-Zor dan al-Hasaka, tuntutan yang disampaikan pun pada akhir nya beragam, semua bermula yang awal nya hanya menuntut pembebasan terhadap anak-anak sekolah yang ditangkap karena membuat grafiti sampai menjadi tuntutan agar Rezim Assad diturunkan.

Pada hari Jum'at 18 Maret 2011 terjadi demonstrasi di seluruh wilayah Suriah yang dimana aksi tersebut menjadi viral di media sosial dan menyebar ke seluruh dunia, hal tersebut membuat pemerintah tidak tinggal diam,, untuk mencegah penyebaran video tersebut pemerintah melakukan pemadaman listrik secara masif begitu pula layanan telfon. Gerakan demonstrasi tersebut akhir nya dimanfaatkan oleh pihak oposisi untuk melawan dan berjuang bersama menjatuhkan rezim yang telah lama berkuasa.

Melihat terjadi nya sebuah revolusi di Suriah, pada pertengahan agustus 2011 Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada dan Uni Eropa menyatakan bahwa rezim Assad tidak lagi sah dan menyerukan agar Bashar al-Assad untuk turun dari tampuk kepemimpinan nya. Reaksi lain datang dari Dewan Keamanan PBB, namun China dan Russia menggunakan hak veto nya untuk melarang

campur tangan pihak asing dalam konflik Suriah, akibatnya agenda intervensi konflik Suriah gagal diterapkan di Suriah.(ABM, 2013, hal. 177)

Revolusi yang terjadi di Suriah tidak hanya memperlumahkan tentang sikap ke otoriteran Bashar al-Assad, pertikaian antara Sunni dan Syiah, tetapi juga dikarenakan keadaan yang semakin kacau akibat dugaan penggunaan senjata kimia oleh Pemerintah Suriah, pada Pertengahan Agustus 2013 pemerintah menggunakan senjata kimia di Suriah sejak terjadinya perang di pinggir kota Damaskus menelan lebih dari 400 orang tewas akibat senjata kimia gas sarin, mustard, dan VX selain korban tewas terdapat korban luka-luka yang terdampak oleh gas beracun. (Serangan Senjata Kimia Pemerintah Suriah, 2013)

Dalam konflik di Suriah terdapat beberapa pihak yang saling berseteru, pihak oposisi di isi oleh FSA (Free Syrian Army) kelompok ini dipimpin oleh Rif'ad al-Assad yang merupakan adik dari presiden Hafiz al-Assad, ayah dari Bashar al-Assad, kelompok ini mendeklarasikan diri ikut melawan pemerintah pada Juli 2011.(Gamaghelyan, 2013, hal. 104) Kelompok yang kedua yaitu Ikhwanul Muslimin, kelompok ini sudah memulai pemberontakannya sejak lama dari tahun 1970 dan di awal 1980an, kelompok ini dipimpin oleh Ali Sadreddine al-Bayanouni, kelompok ketiga yaitu NSF (National Salvation Front) yang sebagian anggotanya merupakan anggota Ikhwanul Muslimin, kelompok ini dipimpin oleh mantan wakil presiden Abdul Halim Khaddam.

Kelompok yang keempat yaitu *National Democratic Gathering* yang pada tahun 1970 ikut berdemonstrasi yang kemudian para ketua kelompok itu dijadikan tahanan politik saat Hafiz al-Assad masih menjadi penguasa, kelompok ini kembali memimpin aksi massa pada tahun 2011, kelompok ini merupakan koalisi politik sekuler yang terbentuk pada 1979 oleh lima partai berhaluan nasionalis dan kiri ilegal, yaitu Uni Sosialis Arab Demokartik, Partai Rakyat Demokratik Suriah, Gerakan Sosialis Arab, Partai Revolusioner Buruh, Partai Sosialis Arab Ba'ath Demokratik dan Partai Aksi Komunis. Kelompok Jabah al-Nusrah disebut berafiliasi dengan Al-Qaeda yang bertujuan mendirikan Khilafah Islam setelah tumbang nya Rezim Assad.

Penyebab Terjadinya Konflik Suriah

Beragam pendapat yang dikemukakan terkait masalah yang menjadi sumber konflik di Suriah. *Pertama*, masalah sosial, ekonomi dan politik dalam negeri yang dialami oleh Suriah seperti tingginya jumlah pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya kesempatan mobilitas sosial, pembatasan hak politik serta aparat keamanan yang represif. *Kedua*, tuntutan penduduk Suriah agar dilakukan reformasi dan penggantian rezim keluarga Assad yang berkuasa sejak tahun 1970 sampai saat ini.(Kartaatmaja, 2014, hal. 43)Adapun penulis akan membagi faktor lain penyebab terjadinya konflik Suriah ke dalam tiga bagian yaitu; Faktor Ekuualitas, Faktor Legalitas dan Faktor Kontinuitas.

Faktor Ekualitas

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan ekualitas adalah adanya kesamaan status, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh sesama anggota masyarakat, kelompok tertentu, atau sebuah keluarga. Hal tersebut terkait dengan salah satu faktor yang akan penulis bahas sebagai faktor terjadinya konflik, yaitu dimana Suriah masyarakatnya sebagian besar terbagi-bagi menjadi beberapa bagian dalam banyak hal salah satunya dalam urusan kelompok agama.

Di Suriah itu sendiri, diketahui bahwa penduduknya merupakan etnis Semit dengan 90 persen terdiri atas warga Muslim, 74 persen Sunni dan 16 persen terdiri atas kelompok Muslim lainnya termasuk Alawi, Syiah dan Druze, sementara itu 10% dari penduduknya merupakan penganut agama Kristiani. (Hunter, 2001, hal. 59) Dapat dikatakan umat Islam menjadi kelompok Mayoritas di Suriah, warga Muslim ini terbagi lagi menjadi dua kelompok di Suriah yaitu: kelompok Islam Sunni dan Kelompok Islam Syiah yang dalam sejarahnya dua kelompok yang sama-sama Islam ini memiliki hubungan yang tidak bisa dikatakan harmonis.

Kemunculan dua kelompok yaitu Sunni dan Syiah tidak terlepas dari persoalan penentuan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dan kemudian Sunni dan Syiah terbagi menjadi beberapa mazhab / aliran yang menyebar ke beberapa wilayah termasuk salah satunya Suriah. (Hitti, 2014) Ini menyebabkan timbulnya konflik dikarenakan kurangnya toleransi dalam keberagaman agama dan aliran kepercayaan di Suriah.

Setelah Suriah merdeka pada 17 April 1945, kelompok nasionalis yang sebagian besar anggotanya berasal dari elit Sunni menjadi pewaris pemerintahan yang kemudian para elit ini secara otomatis menguasai militer yang kemudian digunakan sebagai alat kudeta, akan tetapi kekuasaan di Suriah beralih ke kelompok Alawi bersama partai Ba'ath yang didirikan oleh Michel Aflaq dan Salah al-Din Bitar pada tahun 1940. Kelompok ini berideologikan sekularisme dan memiliki sentimen nasionalisme Arab yang pada saat itu erat kaitannya dengan kelompok Sunni maka dari itu kelompok minoritas agama tersebut cenderung mencurigai nasionalisme Arab sebagai alat untuk menyamar atas kekuasaan Sunni yang mendominasi dan tak terkendali, akhirnya terlahirlah Partai Ba'ath yang mempunyai tiga prinsip dasar yaitu; kesatuan, sosialisme dan kebebasan.

Selama periode penggabungan Suriah dan Mesir pada tahun 1958 sampai 1961 semua partai politik termasuk Ba'ath dibubarkan, tetapi perwira yang pro terhadap Ba'ath tetap berjuang secara diam-diam, di antara mereka adalah Salad Jadid, Hafiz al-Assad, Hamad Ubayd dari Druze serta Muhammad Uman dari Alawi. Mereka berusaha agar tentara Suriah kembali berada dibawah kontrol Suriah, partai Ba'ath memanfaatkan momentum berakhirnya persatuan Mesir-Suriah untuk kembali bangun dari tidurnya, dengan sebagian besar faksinya

berada dalam Militer, partai Ba'ath melakukan Kudeta pada 8 Maret 1963 yang membuat kekosongan politik di isi oleh kader Alawi bahkan kader Sunni yang telah lulus pun ditolak mentah-mentah sementara kader Alawi diterima dengan mudah, meski begitu masih cukup banyak faksi militer yang diisi oleh orang Sunni yang menduduki posisi penting yang dipertahankan bukan atas dasar kelompok tetapi sebagai individu yang profesional dalam artian politis.

Rezim Suriah saat ini menganut ideologi Syiah Nushairiyah yaitu sebuah sekte Syiah yang dapat dikatakan Ekstrim. Aliran Syiah ini mendukung aksi *Cleansing Ideology* terhadap kelompok yang ber aliran Sunni, berbagai ancaman dilakukan oleh kelompok Syiah ini terutama kepada kelompok Muslim Sunni yang mana kelompok Sunni berusaha di usir agar keluar dari Suriah, kelompok Syiah ini dengan jelas mendukung Rezim Assad yang merupakan keluarga yang ber aliran Syiah untuk mempertahankan kekuasaan nya sebagai Pemimpin Suriah.

Faktor Legalitas

Menurut KBBI arti kata dari Legalitas merupakan perihal (keadaan) sah atau mengenai keabsahan yang dimana Dalam Konflik ini Rezim yang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaan nya, Presiden Bashar al-Assad mengklaim bahwa ia merupakan presiden yang terpilih secara sah dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat Suriah sehingga segala cara untuk menjatuhkan kepemimpinan nya dianggap sebagai kudeta ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, ke absahan nya sebagai Presiden yang sah masih menjadi bahan perdebatan dikarenakan pada saat pemilu yang diadakan pada 2014 Assad kembali menjadi pemenang dalam pemilu tersebut dengan perolehan suara sebanyak 88,7 persen, tetapi pemilu ini hanya diselenggarakan di wilayah kekuasaan pihak pemerintah namun tidak di wilayah Timur dan Utara yang dikuasai oleh pihak oposisi. Dalam pemilu ini pula pertama kali nya dalam puluhan tahun diluar keluarga Assad terdapat nama calon Presiden lain yang ikut bertarung dalam pemilu di Suriah.

Pihak Oposisi dan pengkritik Assad di wilayah yang dikuasai pihak Oposisi menanggapi pemilu sebagai pemilu yang tidak memiliki kredibilitas dikarenakan pada saat pelaksanaan pemilu tersebut Suriah sedang terpecah belah oleh perang saudara dan kebanyakan penduduk Suriah memilih untuk menyelamatkan diri ke luar negeri, yang pada akhir nya kredibilitas hasil dari pemilu tersebut dipertanyakan, demikian pula yang dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang mengatakan bahwa pemilihan umum yang diumumkan oleh Ketua Parlemen Mohammad al-Laham tersebut tidak memiliki arti apa-apa.

Presiden Bashar al-Assad pernah berjanji bahwasan nya ia akan melakukan pemilu untuk membuktikan bahwa ia merupakan Presiden terpilih yang sah. Haal ini dibuktikan dengan Pemilu tahun 2014 yang dimana Assad kembali diangkat menjadi presiden, tetapi keabsahan pemilu itu dipertanyakan lantaran pelaksanaan pemilu yang tidak tepat, yaitu pada waktu perang sedang

berlangsung dan lingkup wilayah pemilu itu sendiri yang tidak dilaksanakan di wilayah Utara dan Timur Suriah tetapi hanya di wilayah kekuasaan pemerintah. Salah satu pihak yang tidak mempercayai hasil pemilu tersebut yaitu Amerika, Amerika justru lebih berfokus kepada pemberian bantuan terhadap pihak oposisi pemerintah berupa bantuan *Non-Lethal Aid* seperti yang dikatakan seorang Senator Amerika bernama John McCain, dan sebagai bentuk protes nya Amerika menutup kedutaan besar nya di Suriah.

Faktor Kontinuitas

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti dari Kontinuitas yaitu kesinambungan; kelangsungan; kelanjutan atau keadaan kontinu. Dalam kasus Konflik Suriah ini terlihat bahwasannya Presiden Assad berusaha untuk menjaga Kontinuitas Rezim keluarganya yang berlangsung dari tahun 1970 agar tidak tumbang melawan pihak oposisi dan rakyatnya. Berbagai cara dilakukan Bashar al-Assad untuk mempertahankan kekuasaannya seperti penggunaan kekuatan militer.

Pada awal Konflik Bashar al-Assad berusaha membungkam pihak-pihak yang dianggap membahayakan kekuasaannya dengan Undang-Undang Darurat tahun 1963, seperti halnya yang terjadi kepada anak-anak yang membuat grafiti yang bertuliskan penolakan terhadap Rezim Assad yang otoriter sehingga akibat bentuk protes tersebut anak-anak tersebut ditangkap dan disiksa oleh aparat yang sangat represif.

Lalu saat terjadinya demonstrasi besar-besaran Rezim Assad menggunakan militer untuk menghentikan hal itu secara paksa tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan rakyatnya, semua itu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan rezim Assad yang berlangsung lebih dari 40 tahun. Cara lain yang dilakukan Assad yaitu dengan mengadakan Pemilihan Umum / Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2014 yang dimana Bashar al-Assad dianggap curang oleh berbagai kalangan dikarenakan pelaksanaan Pemilu itu sendiri yang dilakukan saat terjadi peperangan yang mengakibatkan perpecahan di dalam negeri serta kebanyakan dari masyarakat Suriah memilih untuk menyelamatkan diri dari peperangan ke luar negeri, pelaksanaan Pemilu itu tidak mencakup seluruh wilayah Suriah dan hanya berlangsung di wilayah kekuasaan Rezim Assad tetapi tidak di wilayah Timur dan Utara Suriah yang dikuasai oleh oposisi.

Sehingga menurut pihak oposisi Pemilu tersebut tidak memiliki kredibilitas dan menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pemilu tersebut tidak memiliki makna / arti apapun. Walaupun dalam pemilu tersebut Bashar al-Assad dalam berpuluh-puluh tahun untuk pertama kalinya memiliki lawan bersaing untuk memperebutkan kursi kepemimpinan yaitu Hassan al-Nouri yang mendapat 4,3 persen suara dan Maher Hajjar yang mendapatkan 3,2 persen suara, tetapi sangat berbeda dengan Assad yang mendapat suara mayoritas

secara telak sebesar 88.7 persen sehingga menurut beberapa pihak, Pemilu yang dilaksanakan ini dikendalikan oleh Rezim Assad dikarenakan tempat berlangsungnya pemilu tersebut dikuasai oleh Rezim nya

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENINGKATAN KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DI SURIAH :

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi / penyebab Amerika Serikat ikut melibatkan diri dalam konflik di Suriah dan dijabarkan melalui sub bab, yaitu sebagai berikut; Kondisi dalam negeri Amerika Serikat, Ekonomi dan Militer serta Konteks Internasional.

Kondisi Dalam Negeri Amerika Serikat

Promosi HAM tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, tetapi juga dluar negeri oleh karena itu HAM memegang peranan penting dalam kebijakan luar negeri sepanjang sejarah Amerika Serikat yang dimana dalam kasus Suriah Amerika berusaha untuk melakukan intervensi dalam Konflik Suriah karena terdapat kasus pelanggaran HAM dalam bentuk konkrit yaitu dengan adanya penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Rezim Assad dalam peperangan terhadap rakyat nya sendiri.

Walaupun masyarakat Amerika kurang mendukung adanya intervensi pemerintah yang dilakukan di Suriah, hal ini ditunjukkan dengan aksi demonstrasi di depan Gedung Putih pada 28 September 2013 yang dimana para aktivis anti perang menginginkan agar Amerika tidak ikut campur dalam konflik tersebut lantaran hanya memperumit konflik yang terjadi di Suriah. Hal serupa juga dilakukan di New York Times Square dimana sekitar 200 orang meneriakkan “tidak berperang di Suriah”, di Houston sebaliknya terdapat aksi yang mendukung serangan militer ke Suriah lantaran penggunaan senjata kimia oleh Rezim Assad yang menewaskan ratusan orang.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters pada 26 April hingga 1 Mei 2013 kepada warga Amerika Serikat, hanya sebesar 10 persen warga Amerika yang setuju terhadap intervensi Amerika di Suriah, sedangkan 61 persen responden menolak keterlibatan Amerika di Suriah. Tetapi jika dikaitkan dengan penggunaan senjata kimia oleh Rezim Assad terhadap rakyat nya, jumlah warga yang setuju meningkat persentasenya sebesar 27% sedangkan 44% tetap menolak adanya intervensi tersebut. Hal ini bisa dikaitkan dengan kejadian masa lalu dimana Amerika mengintervensi Afghanistan dan Irak sehingga masyarakat Amerika merasa lelah dan tidak bersela terhadap hal-hal yang berbau intervensi.

Walaupun begitu pemerintah tetap melakukan intervensi melalui berbagai cara, seperti pengiriman bantuan berupa makanan, obat-obatan dan bantuan berupa pendanaan bagi pihak oposisi yang berusaha menggulingkan Assad, lalu Amerika menggunakan Organisasi Internasional untuk membantu mengumpulkan berbagai macam bantuan bagi Suriah, lalu dari segi militer serangan udara oleh militer Amerika di Suriah yang menewaskan puluhan tentara pemerintah Suriah

yang terjadi pada tahun 2016 mendapat kecaman dari berbagai pihak terutama Rusia karena pihak Amerika dianggap tidak mau berkoordinasi atas serangan itu. (BBC, 2016) Pemerintah Amerika menilai bahwa intervensi nya di Suriah merupakan tindakan yang sudah diperhitungkan dengan baik terlepas dari ketidaksetujuan mayoritas warga nya.

Ekonomi dan Militer

Melihat terjadinya konflik di Suriah Amerika tidak tinggal diam, Presiden Obama sebagai *Policy Influencer* berusaha meyakinkan Kongres agar memberikan bantuan kepada pihak oposisi Suriah, hal ini dibuktikan dengan pemberian bantuan *Non-Lethal Aid* kepada kelompok oposisi agar dapat terus berjuang melawan Rezim Assad yang dibantu oleh Rusia.

Amerika juga berencana melakukan *Limited Military Strike* kepada Suriah dikarenakan penggunaan senjata kimia terhadap warga sipil yang menyebabkan timbulnya ratusan korban jiwa, Amerika menggunakan isu ini untuk membuka pintu masuk terhadap intervensi nya di Konflik Suriah. Langkah Amerika melalui jalur diplomatis berupa pengajuan Resolusi DK PBB terkait penggunaan senjata kimia tersebut yang menurut OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon) bahwa penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh militer Suriah dikategorikan sebagai temuan yang dapat dibuktikan dan telah melanggar Resolusi PBB 2118 tahun 2013. (Security Council Condemns use of Chemical Weapon in Syria) Di dalam resolusi tersebut tertera bahwa Suriah tidak diperbolehkan menggunakan, mengembangkan, memproduksi atau bahkan mendapatkan atau mengumpulkan senjata kimia. Atau mengirim secara langsung ataupun tidak langsung kepada aktor negara dan non-negara. (Security Council Report: Resolution 2118)

Langkah lain yang dilakukan oleh Amerika yaitu dengan melakukan pertemuan *Action Group for Syria Final Communique* di Swiss, Konferensi tersebut bertujuan untuk memediasi perdamaian di Suriah yang dihadiri oleh anggota "London 11" yaitu sebuah sebutan bagi negara-negara yang mendukung perdamaian di Suriah yang dimana kelompok ini menolak penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Rezim Bashar al-Assad sebagai cara untuk meredakan konflik dengan rakyat nya sendiri.

Amerika dan berbagai Organisasi Internasional lain nya berusaha untuk membantu Suriah dalam krisis di negara nya ini. Sampai 27 September 2016 pemerintah Amerika mengumumkan bahwa Amerika akan menambahkan bantuan humaniter kepada Syria sebesar USD 364 Juta, jika di total sejak tahun 2011 maka sebesar \$6 miliar A.S telah dikucurkan untuk penanganan darurat di Suriah termasuk untuk menyediakan cadangan makanan, obat-obatan, air minum bersih dan suplai lain nya untuk membantu masyarakat Suriah yang terdampak oleh perang. (USAID: Crisis in Syria)

Presiden Obama juga berhasil meyakinkan Kongres untuk memberi bantuan berupa pasokan obat dan pangan kepada pasukan pemberontak dan

Amerika juga akan memberikan bantuan dana sebesar \$60 juta untuk membantu oposisi dalam memperluas wilayah kekuasaannya, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry.

Konteks Internasional

Dalam konteks Internasional pola interaksi antara negara-negara pada umumnya dilandasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Masing-masing negara dalam dunia internasional wajib memberikan tanggapan atas setiap isu internasional yang sedang terjadi, dan setiap negara memiliki pandangan, konsep dan cara tersendiri terhadap politik internasional begitu pula dengan Amerika.

Pada umumnya politik luar negeri Amerika Serikat mempunyai pola antara intervensionis dan isolasionis, pasca era Perang Dunia politik luar negeri Amerika selalu memilih intervensionis sampai saat ini, dimana Presiden Obama melakukan intervensi terhadap Konflik Suriah dengan menggunakan seperangkat organisasi yang mendukung kebijakan Amerika tersebut seperti PBB yang dimana Amerika merupakan termasuk kedalam Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto

Dengan status Amerika sebagai negara Demokrasi terbesar sekaligus negara *Super Power*, Amerika ingin menggunakan kekuatannya tersebut untuk memenuhi keinginannya, dengan dukungan sekutunya atas keterlibatan Amerika dalam Konflik Suriah Amerika dapat melancarkan keinginannya. Untuk memperkuat kepemimpinan Amerika di dunia Obama akan memperkuat keamanan dengan menginvestasikan dana pada bidang kemanusiaan, demi menciptakan dunia yang lebih baik Obama berusaha untuk mencerminkan perilaku yang baik agar dapat menjadi aspirasi masyarakat Amerika dan masyarakat dimanapun harus bisa dan memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka tanpa rasa takut. Amerika Serikat juga berkomitmen untuk memperkuat pilar dari masyarakat dunia yang adil

Situasi di Suriah memungkinkan Amerika untuk melakukan intervensi dikarenakan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rezim Assad terhadap rakyatnya yang menggunakan senjata kimia untuk melawan rakyatnya sendiri, hal tersebut membuat Suriah mendapatkan kecaman dari Komunitas Internasional dan membuat Rezim Assad semakin kehilangan legitimasi sebagai pemimpin Suriah.

Upaya yang dilakukan oleh komunitas internasional adalah dengan mengadakan Konferensi Jenewa II atas prakarsa Amerika dan Rusia yang dimana dalam pertemuan tersebut kedua pihak yang bersengketa diharapkan dapat duduk bersama membentuk sebuah pemerintah transisi dengan wewenang eksekutif penuh, namun nampaknya Konferensi Jenewa ini belum dapat memberikan dampak yang berarti akibat adanya perbedaan kepentingan-kepentingan pihak terkait dalam konflik ini. (Pujayanti, 2013)

Diperkirakan akan ada tiga juta lebih pengungsi Suriah negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, Irak dan Turki hingga akhir tahun 2013 untuk menanggulangi hal tersebut badan PBB yang menangani masalah pengungsi UNHCR telah meminta kepada negara-negara Eropa untuk menerima lebih dari satu juta pengungsi di negara nya.

PBB sendiri telah memiliki resolusi untuk mengenai penanganan pengungsi dengan resolusi No. 429 (V) Desember 1950, Majelis umum mengadakan konferensi untuk membahas tentang pengungsi dan menghasilkan akta final mengenai penanganan pengungsi. Akta tersebut merupakan simbol dari komitmen negara-negara untuk meminimalisir permasalahan pengungsi dan individu yang tidak memiliki kewarganegaraan, hal tersebut ditindaklanjuti dengan diaturnya ketentuan-ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang penanganan pengungsi.

Di dalam Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 dan protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 terdapat pedoman bagi Hukum Pengungsi Internasional untuk masalah penanganan pengungsi termasuk klasifikasi, hak dan kewajiban pengungsi serta kewajiban negara peserta konvensi terhadap pengungsi.

KESIMPULAN

Meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah merupakan hal yang tidak dapat dihindari dikarenakan Amerika merupakan negara dengan pengaruh yang kuat di seluruh penjuru dunia, baik itu dalam hal ekonomi, militer hingga ideologi, ideologi yang digunakan merupakan ideologi demokrasi. Amerika ingin menjadi satu-satunya kekuatan di dunia termasuk Timur Tengah dimana berbagai macam kebijakan telah dibuat dalam upaya untuk memantapkan kekuasaannya, Amerika menganggap dirinya sebagai *Guardian of Democracy* dan *Champion of Democracy* yang ingin selalu terlibat dalam konflik dan ingin dianggap sebagai satu-satunya kekuatan yang ada di wilayah tersebut, tentu saja dengan misi membawa ideologi Demokrasi.

Dalam konteks tersebut dengan Amerika menjadi negara pencetus demokrasi pada saat terjadinya peristiwa Arab Spring, Amerika melihat sebuah prospek dimana peristiwa Arab Spring dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahnya yang mayoritas masih menggunakan sistem pemerintahan Monarki absolut yang mewariskan kekuasaan dengan turun temurun, masyarakat Arab ingin agar negara nya lebih demokratis sehingga munculah gelombang Arab Spring pada tahun 2010.

Banyak dari negara-negara Timur Tengah yang bergejolak akibat adanya rentetan peristiwa Arab Spring yang menimbulkan konflik di Tunisia, Oman, Yaman, Mesir dan Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah tidak lepas dari adanya

perselisihan antara kelompok keagamaan seperti Sunni dan Syiah, ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, sulitnya melakukan mobilitas sosial, hak bersuara yang dibungkam dan kinerja pemerintah yang dianggap tidak dapat memajukan kehidupan masyarakat membuat masyarakat berkeinginan untuk menurunkan Rezim Assad yang dianggap otoriter dan menganut paham Syiah dan pemerintahnya yang represif. Pada prosesnya terbentuklah kelompok oposisi / pemberontak yang berusaha melawan Rezim Assad, disini Amerika masuk melalui dukungannya terhadap pihak oposisi.

Amerika dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama memberikan simpatinya karena Amerika ingin berusaha melindungi rakyat Suriah yang ingin adanya perubahan ke sistem pemerintahan demokrasi, segala upaya dilakukan Rezim untuk mempertahankan legitimasinya seperti melakukan serangan militer hingga penggunaan senjata kimia yang membuat Rezim Suriah dikecam dan diancam oleh sekutu pihak oposisi yaitu Amerika Serikat akan melakukan serangan militer terhadap Rezim Assad karena telah merenggut Hak Asasi Manusia rakyatnya.

Berbagai cara Amerika lakukan untuk melibatkan dirinya serta membantu pihak oposisi dalam memenangkan peperangan melawan Rezim Assad, baik itu melalui bantuan makanan, air minum bersih, obat-obatan atau yang disebut *Non-Lethal Aid* hingga pendanaan bagi respon darurat Suriah hingga bantuan senjata anti-tank yang diberikan oleh Amerika dan bantuan militer berupa serangan-serangan baik dari darat maupun udara terhadap pasukan Rezim Assad.

Adapun Upaya yang dilakukan oleh Komunitas Internasional adalah dengan mengadakan Konferensi Jenewa II atas prakarsa Amerika dan Rusia yang dimana dalam pertemuan tersebut kedua pihak yang bersengketa diharapkan dapat duduk bersama membentuk sebuah pemerintah transisi dengan wewenang eksekutif penuh, PBB pun ikut membantu upaya dalam pembuatan resolusi bagi perdamaian dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan demi penyelesaian Konflik Suriah hal tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mewujudkan adanya perdamaian di Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

ABM, Agastya, M. *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah*, Yogyakarta, IRCiSod, 2013.

Dougherty, James E. & Robert L. Pfatzgraff. Jr. terjemahan M. Amien Rais, et, all.. 1995. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah

G. Lenczowski, *American Presidents and the Middle East*, Duke University Press, Durham, 1990.

Hitti, Phillip K. terjemahan R. Cecep Lukman dan Dedi Slamet Riyadi, et, all.. 2014. *History of Arabs*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta.

Hunter, Shireen T. *Politik Kebangkitan Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001

Jatmika, Sidik. 2014. *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa Publishing House.

John Spanier, *American Foreign Policy Since World War II*. Washington D.C: CQ Press, 1988.

Jones, H. *Crucible of Power: A History of U.S. Foreign Relations Since 1897*, 2nd edition, Scholarly Resources, Oxford, 2008.

J.P Miglietta, *American Alliance Policy in the 1945-1992: Iran, Israel, and Saudi Arabia*, Lexington Books, Lanham, and Oxford, 2002.

Kenneth A. Oye, Robert J. Lieber dan Donald Rothchild, *Eagle Defiant: United States Foreign Policy in the 1980s*. Boston Toronto: Little, Brown and Company, 1983.

Kuncahyono, Trias. *Musim Semi di Suriah: Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2013.

Morgenthau, Hans J. *Politik Antar Bangsa I*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985.

Plano, Jack C. dan Roy Olton, *International Relations Dictionary* (USA: Rinehart and Wingston, Inc., 1969).

Pratt, Julius W. *A History of United States Foreign Policy*, 2nd Edition, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1965.

E-Jurnal & Artikel:

Adirini Pujayanti, *Internasionalisasi Konflik Suriah dan Peran Indonesia*, artikel, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-11-I-P3DI-Juni-2013-16.pdf, diakses pada 19 Februari 2018.

A. Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja. *Politica vol 5: Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*, 1 Juni 2014, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332/266>, diakses pada 31 oktober 2017

Jean Shaoul dan Chris Marsden. *The Bitter Legacy of Syria's Hafez al-Assad*. 16 Juni 2000, <https://www.wsws.org/en/articles/2000/06/assa-j16.html>, diakses pada 15 Februari 2018

John Robert Greene, *Gerald Ford: Foreign Affairs*, Miller Center, <https://millercenter.org/president/ford/foreign-affairs>, diakses pada 13 Februari 2018.

Phillip Gamaghelyan, *A Caution Against Framing Syria as an Assad – Opposition Dichotomy*, 5 Desember 2013. Hlm. 104, <http://turkishpolicy.com/article/651/a-caution-against-framing-syria-as-an-assad-opposition-dichotomy-fall-2013>, diakses pada 16 februari 2018.

“Serangan Senjata Kimia Pemerintah Suriah”, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130821_suriah_kimia, artikel, diakses pada 16 Februari 2018.

Security Council Condemns use of Chemical Weapon in Syria,
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50266#.VYobWpqqko>,
diakses pada 19 februari 2018

Security Council Report: Resolution 2118, www.securitycouncilreport.org,
diakses pada 20 Januari 2018.

Suzanne Nossel, *Smart Power: Reclaiming Liberal Internasionalism*, Foreign
Affairs, Maret 2004, [https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2004-03-01/smart-power](https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2004-03-01/smart-power), diakses pada 16 Februari 2018.

USAID: Crisis in Syria, <https://www.usaid.gov/syria>, diakses pada 19 Februari
2018

U.S Department of State, *A Guide to the United States, History of Recognition,
Diplomatic, and Consular Relation, by Country, since 1776: Syria*,
<https://history.state.gov/countries/syria>, diakses pada 13 Februari 2018.

U.S Department of State, *U.S Relations With Syria*, 20 Maret, 2014,
<https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm>, diakses pada 12 Februari 2018.

Internet:

Associated Press, 'UN chief opposes US arms to Syria rebels, says on site probe
must confirm chemical weapon
use'[http://www.foxnews.com/world/2013/06/14/un-chief-opposes-us-arms-to-
syria-rebels-says-on-site-probe-must-confirm/](http://www.foxnews.com/world/2013/06/14/un-chief-opposes-us-arms-to-syria-rebels-says-on-site-probe-must-confirm/), diakses pada 6 Desember 2017

<https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/factbook/foreign.htm>,
diakses pada 13 februari 2018.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/06/140604_assad_suriah, diakses pada
18 februari 2018.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130228_suriah_bantuan, diakses
pada 19 februari 2018.